

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan keuangan pemerintah menjadi topik penelitian yang menarik di Indonesia karena meningkatnya permintaan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salamun (2007) meningkatkan permintaan untuk pelaporan publik mempengaruhi pemerintah (sektor publik) dengan membuat informasi yang lebih baik tersedia untuk publik. Informasi untuk mengkomunikasikan hasil pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut memenuhi kriteria akuntan publik yaitu relevan (*relevant*), dapat diandalkan (*reliable*), mudah dipahami (*understandable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*).

Pada Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125) yg sudah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang angka 12 Tahun 2008, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan selanjutnya sepenuhnya berada di tangan berasal Pemerintah Daerah (pemda). laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan digunakan oleh seluruh entitas sebagai pedoman dalam membentuk kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka laporan keuangan yang ideal adalah yang memenuhi karakteristik kualitatif serta mampu mempertanggungjawabkan kinerja

keuangannya kepada masyarakat. Kerangka Konseptual Akuntan Publik menyatakan bahwa (PP No. dua Tahun 2005, diubah menjadi PPN No. 71 Tahun 2010).

Karakteristik laporan keuangan adalah relevansi, keandalan, komparabilitas, dan dapat dipahami. Ketika akun keuangan suatu negara akurat, itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Memo laporan keuangan anggaran, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo, laporan aktivitas, dan perubahan akun saham. Keputusan ini juga merupakan implementasi Pasal 18 Pasal 1 dan Pasal 3 UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2000. Hal ini menuntut agar laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi negara yang diatur oleh pemerintah. Serta lembaga negara dan layanan mereka. Jika laporan keuangan disajikan dengan kualitas yang buruk dengan melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, maka akan memberikan informasi yang menyesatkan kepada pengguna dan dapat merugikan pihak yang berbeda.

Hal ini dijelaskan pula oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfaal/8: 27 dan Q.S An Nisa/4: 58 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) wewenang yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahuinya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyampaikan perintahmu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan ketika kamu membuat hukum di antara mereka, untuk mematuhi dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Isi kedua ayat tersebut artinya Allah SWT senantiasa menjaga amanah yang dititipkan pada mereka berupa amanah, menjalankan perintah yg disyaratkan, dan melarang segala sesuatu yg dapat menumbuhkan permusuhan. Akar dari ayat ini pada dasarnya menyatakan bahwa siapa pun yang menerima tugas harus dapat membuat daftar segala sesuatu yang telah diselesaikan. Pemerintah daerah yang menjalankan mandatnya untuk melayani masyarakat harus memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangannya melalui pelaporan keuangan yang berkualitas. agar aktivitas pemerintahan berjalan menggunakan lancar, pemerintah seharusnya berbenah diri buat menyampaikan laporan keuangan dengan baik serta berkualitas. Mengingat betapa pentingnya sebuah laporan keuangan dalam pemerintah, maka seharusnya pemerintah memperbaiki sebuah laporan keuangan dengan baik dan berkualitas. Secara sederhana bahwa kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini audit yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah daerah masih banyak menyajikan datang yang tidak sesuai dalam pelaporan keuangannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak menemukan penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang berpengaruh pada opini audit yang diberikan oleh BPK pada setiap pemerintah daerah.

Tabel 1.1

Opini Audit BPK perwakilan Bengkulu 2017-2020

NO	Opini BPK	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Wajar tanpa Pengecualian (WTP)	2	5	7	9
2	Wajar tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	-	-	-	-
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	8	5	3	1
4	Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-

Sumber : annual Report BPK Perwakilan Bengkulu

Dalam laporan audit di tahun 2017, dari 10 pemerintah daerah yang ada di provinsi Bengkulu hanya terdapat 2 pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu pada pemerintah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-Muko . Ada 8 pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Pada laporan BPK pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu pada Pemerintah Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong , Kota Bengkulu dan terdapat 5 pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian. Pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel bahwa ada

peningkatan yang cukup baik yaitu terdapat 7 pemberintahan Kabupaten dan Kota yang mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Opini BPK yang ada dapat disimpulkan bahwa Opini BPK sebuah pemerintahan tidak stabil hal ini disebabkan oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Terbukti dengan banyaknya laporan keuangan yang belum bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan belum bisa mempertahankannya yang berarti penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak yang belum sesuai dengan standar-standar yang sebagaimana seharusnya dalam tata cara penyajian laporan keuangan.

Standar-standar penyajian laporan keuangan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dalam perkembangannya dituntut untuk mengalami berbagai perubahan. Perubahan standar dan aturan yang terjadi dalam tata cara penyajian laporan keuangan pemerintah dari basis kas menjadi basis akrual membuat kemampuan aparatur pengelola laporan keuangan semakin dibutuhkan.

Defitri (2018) menyatakan bahwa Menurut laporan keuangan yang akurat, manajer daerah bertugas melaksanakan tugas pengelolaan organisasi sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan digunakan untuk menginformasikan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Mereka juga berfungsi sebagai berbagai bukti akuntabilitas dan manajemen dalam menilai kinerja organisasi dan kepatuhan terhadap aturan dan undang-undang yang

mengatur penyusunan laporan keuangan. Husna dkk (2022) menyatakan sejumlah faktor mensugesti kualitas pelaporan keuangan, antara lain keahlian pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan wilayah. Kompetensi sumber Daya (SDM) itu sendiri artinya kemampuan seorang dengan pembinaan serta pengalaman yg sempurna buat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. sang sebab itu, pelaporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia (sdm) yang terampil buat memahaminya dengan baik dan cepat buat memberikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yosefrinaldi (2013), Nurillah & Muid (2014), dan Ihsanti (2014) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Husna dkk (2022) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan handal sangat diperlukan untuk membuat laporan keuangan berkualitas tinggi saat membuat laporan keuangan. Sebaliknya, jika SDM kurang memiliki keahlian atau pemahaman yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan, SDM juga akan memberikan laporan keuangan yang berkualitas rendah. Jika SDM memiliki pengetahuan dalam menghasilkan laporan keuangan, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat baik. Personil yang berkualifikasi tinggi tidak hanya secara langsung mempengaruhi kualitas LKPD, tetapi juga meningkatkan pelaksanaan SPIP di lembaga, yang akan berdampak Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD (Sudiarianti 2015).

SPIP yang dilakukan oleh SKPD dengan kemampuan menghasilkan LKPD yang satisfy the relevant, trustworthy, comparable, and understandable standards. *The effectiveness of a company's human resource management is crucial to its ability to achieve its objectives* (HR). Dalam organisasi publik, peran manajemen sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, agar organisasi tetap memiliki reputasi yang baik dan bertanggung jawab di mata masyarakat (Zubaid,2019). Selain itu, salah satu elemen yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemrosesan transaksi yang lebih cepat, komputasi yang presisi, penyimpanan data dalam jumlah besar, dan kemampuan multiprosesor merupakan keuntungan dari penggunaan teknologi informasi ini.

Organisasi juga sangat bergantung pada sistem informasi akuntansi terkomputerisasi, dan karena bisnis menjadi lebih rumit, begitu juga transaksi yang mereka lakukan. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, serta semakin banyaknya organisasi sektor publik seperti pemerintah negara bagian dan organisasi bisnis semakin berkembang setiap saat (Mahendra 2020) . Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berencana meningkatkan kualitas personel, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Mengetahui kebutuhan sistem informasi bagian keuangan dan sekaligus mengetahui cara menggunakannya sebagai

masukannya bagi bagian yang mengelola sistem informasi dalam pengembangan sistem yang ada. Untuk mencapai hasil terbaik, masalahnya adalah keandalan pelaporan keuangan. Itulah mengapa sistem informasi menjadi sangat penting, karena dengan sistem informasi akuntansi yang baik, tindakan yang tepat sasaran juga berkualitas tinggi, efektif dan penting.

Sistem informasi akuntansi adalah bagian atau subsistem dari suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi keuangan untuk keputusan manajemen. Sistem informasi akuntansi membantu memberikan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh instansi/lembaga eksternal maupun internal. Pada prinsipnya sistem informasi akuntansi juga dapat digunakan tanpa komputer, namun keikutsertaan komputer dalam memproses tugas-tugas manusia dalam sistem sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran sistem, sehingga diperlukan informasi bagi pihak manajemen dapat diekspose dengan cepat dan tepat waktu (Tawaqal 2017). Menurut Peraturan Menteri pada Negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan menjadi serangkaian prosedur mulai asal pendataan, pencatatan, penelaahan usulan hingga pelaporan keuangan terkait pelaporan kinerja APBD, yg bisa dilakukan secara manual atau memakai perangkat lunak personal komputer .

Utilitas sistem akuntansi wilayah dapat menjawab tuntutan masyarakat akan peningkatan transparansi serta akuntabilitas lembaga

publik. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi perekonomian wilayah adalah sistem yang mendokumentasikan serta mengolah perekonomian wilayah serta info terkait, mulai dari pendataan, penyimpanan, proses ikhtisar hingga pelaporan keuangan sampai info keuangan yg disajikan kepada publik. dan menjadi bahan pengambilan keputusan terkait perencanaan, aplikasi serta pelaporan akuntabilitas (Herawati, 2014). Ketersediaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa sistem akuntansi ekonomi daerah adalah sistem yang mencatat dan menyusun informasi yang terkait dengan ekonomi daerah, termasuk pengumpulan, pencatatan, dan peringkasan, serta penggunaan berbagai laporan keuangan seperti pelaporan aplikasi dan pertanggungjawaban.

Dengan menggunakan sistem akuntansi, risiko kesalahan dan kesalahan dalam akuntansi atau akuntansi dapat diminimalkan, dan kota dapat menghadapi risiko yang lebih serius (Herawati, 2014). Laporan keuangan berikutnya kurang dapat dipercaya dan kurang berguna untuk pengambilan keputusan karena sistem akuntansi yang buruk. Oleh karena itu, sistem akuntansi daerah yang baik harus diterapkan untuk menyusun laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Ramadhani (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Defitri (2018) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Hanifa, (2016) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu peneliti menduga sistem pengendalian internal dapat memediasi sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Alasan dugaan pertama sesuai dengan fungsi sistem pengendalian internal yang dikatakan yaitu sebagai pengendali dan pengaturan sistem pemerintah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Mahendra (2020) menyatakan Pengendalian internal adalah sistem prosedur organisasi yang mendorong pengembangan kebijakan manajemen untuk meningkatkan efektivitas operasional, menjaga aset, dan menghentikan penyalahgunaan aset. Sistem pengendalian sistem informasi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting. Fungsi sistem pengendalian internal tersebut sejalan dengan tujuan adanya kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan keuangan serta dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Fungsi yang sejalan dengan fungsi sistem pengendalian internal tersebut membuat peneliti menduga bahwa kualitas laporan keuangan akan semakin baik, yang dapat dilihat dari hasil audit BPK. Fungsi pengendalian internal memastikan bahwa data akuntansi akurat dan dapat diandalkan. Bahaya kesalahan dan kesalahan dalam pembukuan atau pencatatan dapat

dikurangi dengan sistem pengendalian akuntansi internal yang kompeten, yang menurunkan kemungkinan kesalahan di pemerintah daerah. Menurut peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008, pengendalian intern adalah proses menyeluruh dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau seluruh karyawan dengan keyakinan bahwa tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien, berdasarkan data dari laporan keuangan, pemantauan aset oleh negara dan penegak hukum, maupun dengan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Humairoh, 2013) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan steknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi saat ini masih ada yang belum menjamin kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tampaty, (2017) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bondowoso.

Penelitian Syarifudin, (2014) di Pemerintah Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid, (2014) yang menunjukkan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian (Syarifudin, 2014), sistem pengendalian internal pemerintah mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rochmatin, (2018) menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Penggunaan sistem informasi akuntansi berdampak positif pada efisiensi sistem pengendalian internal, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas laporan keuangan.

Efisiensi sistem pengendalian internal juga berdampak positif terhadap kompetensi sumber daya manusia yang pada gilirannya berdampak positif pula terhadap kualitas laporan keuangan. Melalui efisiensi sistem pengendalian internal, penggunaan sistem informasi akuntansi memberikan dampak yang menguntungkan bagi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Drama (2014) menyatakan bahwa pengaruh penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan daerah, pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern, pengaruh sistem penendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Andriani

(2016) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Indrayani (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa meskipun pelaporan keuangan baik, namun bukan menjadi tolak ukur untuk menentukan kualitas laporan keuangan baik atau buruk, melainkan berdasarkan survei, jawaban, pencatatannya masih buruk, secara kronologis juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena jika seluruh bagian dilakukan dengan sempurna atau baik maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Atas dasar penelitian diatas yang tidak konsisten maka, peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan menambah variabel penerapan sistem akuntansi keuangan sebagai variabel independen dan menggunakan efektivitas sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan menambah Variabel tersebut maka akan diuji apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif atau negatif terhadap efektivitas apakah efektivitas sistem pengendalian internal memediasi pengaruh sistem akuntansi terhadap sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan, apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengendalian internal. Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini adalah, organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi Bengkulu dipilih

sebagai sasaran penelitian dalam penelitian ini karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi seluruh OPD pemerintah daerah. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya dimana lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern?
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern ?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern?
4. Apakah efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
6. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?
7. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan ?

8. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh sistem akuntansi keuangan kualitas laporan keuangan ?
9. Apakah efektivitas pengendalian intern mampu memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan ?
10. Apakah pengendalian intern mampu memediasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Apakah efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

8. Apakah efektivitas sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh sistem akuntansi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
9. Apakah efektivitas pengendalian intern mampu memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan .
10. Apakah pengendalian intern mampu memediasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu,

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris bahwa sistem akuntansi keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh efektivitas sistem pengendalian internal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi OPD

memberikan gambaran mengenai kualitas laporan keuangan yang baik, sesuai dengan standar laporan keuangan agar bisa lebih akuntabilitas. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menganalisis

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat membantu masyarakat mengenai pengaruh

kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi 11 akuntansi, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.